



## Eksistensi Disnakertrans dalam Menangani Maraknya Pengangguran di Jawa Tengah

Hernan Ridho Wibowo<sup>1</sup>, Sigit Sugandi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

---

### Abstrak

Received: 04 Juni 2024

Revised: 11 Juni 2024

Accepted: 18 Juni 2024

*Nowadays, increasingly modern developments can influence the effectiveness of a country in certain areas, one of which is employment. Indonesia is a large country with a large territory and a relatively large number of people. This means that if a country does not have good and effective employment, its economy will be weak. This research presents data regarding the existence of the Manpower and Transmigration Department in the employment sector. This research aims to explore the role and impact of the Manpower and Transmigration Department in dealing with the lack of job opportunities for the community, which has resulted in large numbers of unemployment and poverty in a country, especially Indonesia. Apart from that, this research also provides solutions and suggestions that can be used to overcome the widespread unemployment that occurs, especially in the Central Java region.*

**Keywords:** *Department of Manpower and Transmigration, employment, unemploymen*

(\*) Corresponding Author: [ridhernann@students.unnes.ac.id](mailto:ridhernann@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Wibowo, H. R., & Sugandi, S. (2024). Eksistensi Disnakertrans dalam Menangani Maraknya Pengangguran di Jawa Tengah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12525053>.

---

### PENDAHULUAN

Manusia berusaha memuaskan hasratnya dengan hidup untuk dirinya sendiri dan orang lain. Bagi banyak orang pekerjaan menjadi sebuah kebutuhan krusial yang diatur oleh undang-undang yang mencakup berbagai profesi. Peraturan-peraturan ini yang dibuat oleh pemerintah, bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional, selaras dengan tujuan umum Indonesia. Pembangunan melibatkan upaya yang bertujuan untuk mendorong perubahan positif, meningkatkan kualitas hidup, kemakmuran, dan atribut manusia. Pengangguran yang semakin tinggi angka persentasenya kini dapat menimbulkan permasalahan baru di dalamnya, salah satu permasalahan tersebut yaitu mengenai kemiskinan. Masyarakat yang menghadapi kemiskinan berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena keterbatasan sumber daya, ditambah dengan upah yang tidak mencukupi untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup, sehingga menimbulkan tantangan dalam berbagai aspek kehidupan. Pertumbuhan populasi semakin berdampak pada daya saing, khususnya di pasar kerja. (Rendi Santoso, Hendro Saptono & Program, 2019) Mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan kolaboratif dan terpadu yang mencakup berbagai sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mengatasi permasalahan ini tidak harus dipisahkan dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas; sebaliknya, hal ini memerlukan upaya terkoordinasi lintas sektor untuk mendorong perubahan



ekonomi, mendorong kemajuan, dan meningkatkan kemungkinan penyelesaian berbagai masalah sosial. Penanggulangan kemiskinan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan secara komprehensif, selaras dengan prioritas dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Pendekatan ini harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan, yang mencakup strategi jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, tolok ukur utama keberhasilan pembangunan nasional terletak pada penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Pentingnya penurunan angka kemiskinan menjadi semakin penting ketika memilih strategi atau alat pembangunan suatu daerah. Hal ini mencakup inisiatif untuk mengatasi tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, yang masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Pembangunan adalah upaya sistematis yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kemajuan ekonomi. Efektivitas pembangunan diukur dari ekspansi dan konfigurasi perekonomian, serta kesenjangan kekayaan antar individu, wilayah, dan industri. Tujuan utama dari inisiatif pembangunan ekonomi tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan substansial tetapi juga untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Tantangan besar dalam ketenagakerjaan di negara-negara berkembang berasal dari tingginya tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan terbatasnya kesempatan kerja, yang mengakibatkan ketidakmampuan pasar kerja untuk mengakomodasi angkatan kerja yang ada di negara yang sedang berkembang. Dalam konteks kemajuan ekonomi di negara-negara berkembang, meningkatnya pengangguran menimbulkan tantangan yang kompleks dan berat, terutama disebabkan oleh pergeseran distribusi pendapatan yang tidak menguntungkan di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Selama beberapa dekade terakhir, situasi di negara-negara ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pembangunan ekonomi, kegagalan dalam menciptakan lapangan kerja dengan kecepatan yang melebihi pertumbuhan penduduk. Kesulitan pengangguran yang meluas ini, yang terjadi di banyak negara, merupakan isu penting yang secara konsisten ditangani dalam rencana pembangunan ekonomi masyarakat. Namun, untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif diperlukan kajian mendalam terhadap akar permasalahannya. Jumlah tenaga kerja yang besar di Provinsi Jawa Tengah menghadirkan potensi pasar yang besar. (Sari, 2021) Meskipun jumlah penduduk yang besar di provinsi ini berpotensi menjadi kekuatan pendorong perekonomian, tantangan saat ini terletak pada transformasi jumlah penduduk yang cukup besar ini menjadi aset yang berharga bagi pembangunan ekonomi. Fokusnya harus pada mendorong pertumbuhan populasi yang cepat yang menghasilkan tenaga kerja yang berlimpah dan terampil, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kegagalan untuk menyalurkan keunggulan demografis ini secara efektif dapat menimbulkan beban bagi negara, menghambat kemajuan ekonomi dan menyebabkan peningkatan pengangguran karena angkatan kerja yang ada masih kurang dimanfaatkan di pasar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode *juridical empiris*. *Juridical empiris* adalah penelitian yang dilakukan secara empiris atau turun langsung kelapangan. Dapat diartikan bahwasanya penelitian ini memiliki dua sudut pandang di dalamnya, yakni sudut pandang yang mengacu dengan peraturan perundang-undangan dan sudut pandang yang berfokus pada teori-teori ilmu social tentang hukum sehingga dapat memudahkan dalam meneliti dan menganalisis suatu masalah tertentu. Penelitian ini secara spesifik berupa penelitian deskriptif analisis dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap kinerja kelembagaan Dinakertrans Jawa Tengah dalam memberantas pengangguran yang telah merajalela.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung kepada pihak lembaga yang terkait, yakni Bapak Arge beserta staff nya untuk memberikan penjelasan mengenai tugas, fungsi dan peran yang dilakukan oleh Disnakertrans dalam menangani permasalahan yang tak kunjung berakhir yaitu berupa banyaknya pengangguran. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berisikan tentang pengaturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan Disnakertrans dalam menandai permasalahan pengangguran di Jawa Tengah. Data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini menggunakan metode kualitatif. Analisis ini menggunakan metode kualitatif, dimana data kualitatif diambil dari data yang dikumpulkan, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas. (Ntobuo & Yusuf, 2016)

## **PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah kewarganegaraan terbanyak ke-empat setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Pada 28 Juli 2023 tercatat bahwa total kewarganegaraan Indonesia Telah mencapai 277,77 juta jiwa. Dengan begitu banyaknya warga negara, Indonesia seharusnya juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, sehingga hal tersebut dapat mengurangi populasi pengangguran dan kemiskinan bagi warga negaranya. Namun, pada kenyataannya Indonesia belum mampu untuk memberantas kamiskinan dan mengurangi populasi pengangguran. Hal tersebut dapat di asumsikan bahwasanya warga negara Indonesia lebih banyak yang memilih untuk mencari lapangan kerja di luar negeri dari pada di dalam negeri. Menurut Bank Indonesia (BI), jumlah pekerja migran Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 3,44 juta orang, meningkat 5,59% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,25 juta orang. Meskipun terjadi peningkatan, statistik saat ini masih berada di bawah angka sebelum Covid-19, yaitu sebesar 3,74 juta orang pada tahun 2019. Sesuai data nasional, Malaysia menjadi tuan rumah bagi populasi pekerja migran Indonesia tertinggi, yaitu sebanyak 1,67 juta orang. Selanjutnya, Arab Saudi menempati urutan kedua dengan jumlah pekerja migran sebanyak 837.000 orang. Di Hong Kong, populasi pekerja migran Indonesia berjumlah 339.000 orang,

sedangkan di Taiwan berjumlah 331.000 orang. Singapura dan Yordania masing-masing menampung 95.000 dan 43.000 pekerja migran Indonesia. Selain itu, Uni Emirat Arab adalah rumah bagi 39.000 pekerja migran Indonesia.

Demikian sebaliknya yang terjadi di Jawa Tengah, tingkat kemiskinan akhir-akhir ini mengalami penurunan di Provinsi Jawa Tengah; namun, kemiskinan terbuka telah meningkat hingga tingkat tertentu. Hal ini menunjukkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, sehingga menyebabkan meningkatnya fokus terhadap tenaga kerja asing. Akibatnya, tingkat pengangguran lokal di wilayah ini mengalami peningkatan. Jawa Tengah menampung sejumlah besar pekerja internasional. Pada awal tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mendokumentasikan 16.398 pekerja asing di provinsi tersebut, dan sebagian besar berasal dari Tiongkok. Pengawasan terus menerus dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk memantau keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing. Masuknya tenaga kerja asing sering dikaitkan dengan masuknya investor asing ke dalam bidang teknologi dan mengimpor tenaga kerja mereka ke Indonesia, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan angkatan kerja asing secara keseluruhan. (Anwar, 2023) Berdasarkan kerangka teori tersebut, peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap pengangguran ini, termasuk kurangnya kesempatan kerja dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan spesifikasi pekerjaan. Akibatnya, kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut tabel IPM Jawa Tengah pada terakhir tahun 2022.



	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>
--	-----------------------------------

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022
PROVINSI JAWA TENGAH	71,87	72,16	72,79

Sumber : [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id)

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia dengan jumlah pengangguran yang relatif tinggi. Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan pengurangan jumlah pengangguran dengan cara memperbaiki sistem pemerintahan daerahnya. Salah satu lembaga pemerintahan daerah yang aktif dalam bidang tersebut yaitu Disnakertrans Jawa Tengah. Dapat diketahui Disnakertrans merupakan Unit-unit pemerintahan yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, merupakan komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sektor-sektor tersebut.

Sebelum menuju ke peran dan program Disnakertrans dalam menangani pengangguran, dapat dilihat isu-isu strategis bidang ketenagakerjaan, berikut penjelasannya;

### **ISU STRATEGIS BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Terdapat enam isu yang menjadi pokok persoalan di bidang ketenagakerjaan yakni;

1. Meningkatkan penciptaan atau perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai DUDI.
2. Penguatan LPK swasta atau pemerintah, untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan terakreditasi.
3. Peningkatan kompetensi instruktur dan upgrading sarpras BLK
4. Peningkatan perlindungan naker melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
5. Optimalisasi E-Makaryo (Menciptakan *demand* dan *supply* naker secara *online realtime* antara DUDI dengan pencaker.

Adapun peran Disnakertrans dalam mengurangi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah yakni sebagai berikut :

### **PROGAM PRIORITAS URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2024**

#### **1. PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS NAKER**

Program yang pertama ini di dalamnya berisikan tentang pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi bidang industry

(kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin). Pelatihan kerja bidang pertanian (kejuruan, pertanian, perikanan, peternakan dan pengolahan hasil pertanian). Pelatihan *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*). Pemagangan dalam dan LN, konsultasi produktifitas pada perusahaan menengah.

## 2. HUBUNGAN INDUSTRIAL

Program yang kedua membahas mengenai pencegahan, penyelesaian penyelesaian HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan satu provinsi melalui pembinaan pembentukan LKS Bipartit. Peningkatan kapasitas SP/SB, pembinaan kelembagaan HI, koordinasi dan konsolidasi HI. Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi, UMK dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota. Pengembangan Pelaksanaan Jamsos Naker dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

## 3. PENEMPATAN TENAGA KERJA

Selanjutnya program ketiga ini berikan tentang Pengelolaan Informasi Pasar kerja melalui E-Makaryo, pelayanan antar kerja lintas Kab/Kota berupa orientasi pra pemberangkatan canaker AKAD. Penyebaran informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja (*Job Canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui padat karya produktif). Peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan, pemberdayaan Tenaga Kerja mandiri (TKM), perlindungan PMI dan pengesahan RPTK dalam satu provinsi.

## 4. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Selanjutnya ada program ke-empat yaitu pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja, penarikan pekerja anak, perlindungan perempuan dan anak (PPA). Serta penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek K3 di perusahaan serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3.

## 5. PERENCANAAN TENAGA KERJA

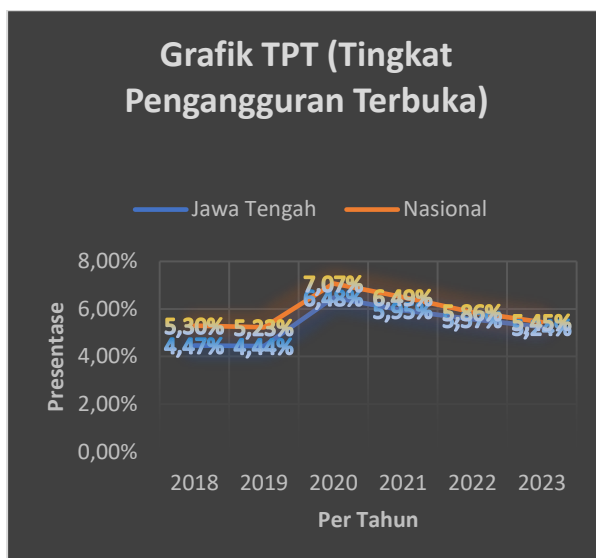
Diarahkan pada Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), termasuk memfasilitasi Kab/Kota dalam penyusunan RTK.

## 6. PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar Pemda Kab/Kota dalam satu provinsi dan pelatihan transmigrasi lokasi. *Sumber : Bappeda Provinsi Jateng.*

## TARGET DAN TUJUAN OPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dapat di simpulkan bahwa target utama dari enam program yang telah dipaparkan diatas yakni "Mengurangi Jumlah Pengangguran". Berikut grafik dari target dan tujuan Disnakertrans Jawa Tengah;



**Gambar 1.** Target dan tujuan OPD DISNAKERTRANS

## URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN PEMDA

Terdapat tiga hal yang menjadi urusan dari pemerintahan kewenangan pemda yang bersumber berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tiga hal tersebut yakni sebagai berikut;

### 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Dalam urusan ini terdiri dari pendidikan, kesehatan, PU dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketetapan umum dan limnas serta sosial.

### 2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Perihal yang berada dalam urusan ini meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan capil, permasdes, pengendalian penduduk dan KB, perhubungan, kominfo, koperasi UKM, penanaman modal, kepemudaan dan OR, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan serta kearsipan.

### 3. URUSAN PILIHAN

Selanjutnya terdapat urusan pilihan yang dimana sekaligus menjadi urusan terakhir, berisikan tentang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Menimbang data yang dikeluarkan oleh Berita Resmi Statistik (BPS) secara konkrit pengangguran di Indonesia terutama di provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfungsi sebagai indikator untuk menilai individu yang tidak terserap di pasar tenaga kerja, yang mencerminkan kurangnya pemanfaatan pasokan tenaga kerja di suatu wilayah tertentu. Temuan Sakernas Agustus 2023 menunjukkan TPT sebesar 5,13 persen, yang berarti sekitar lima dari setiap 100 angkatan kerja merupakan pengangguran. Khususnya, terdapat penurunan TPT sebesar 0,44 poin persentase dibandingkan Agustus 2022, dan penurunan sebesar 0,82 poin persentase jika dibandingkan dengan Agustus 2021.

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki diperkirakan sebesar 5,43 persen, melampaui TPT perempuan sebesar 4,69 persen. Berbeda dengan Agustus 2022, terjadi penurunan TPT laki-laki sebesar 0,32 persen dan TPT perempuan turun 0,62 persen. Selain itu, jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2021, baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan TPT, yaitu terjadi penurunan sebesar 1,11 poin persentase untuk laki-laki dan 0,44 poin persentase untuk perempuan.

Pada Agustus 2023, angka TPT di perkotaan diperkirakan mencapai 5,46 persen, melampaui TPT di perdesaan yang diperkirakan sebesar 4,75 persen. Dibandingkan Agustus 2022, terjadi penurunan TPT perkotaan sebesar 1,93 poin persentase, sedangkan TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 1,11 poin persentase. Berbeda dengan kondisi pada bulan Agustus 2021, baik wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan, dimana TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,000 poin persentase dan TPT perdesaan masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,60 poin persentase, sedangkan wilayah perdesaan mengalami penurunan tipis sebesar 0,01 poin persentase.

TPT pada ranah pendidikan menunjukkan tren yang konsisten, menunjukkan kesamaan antara Agustus 2023 dengan periode sebelumnya. Pada bulan yang ditentukan, TPT lulusan SMK masih tertinggi yaitu sebesar 9,89%, melampaui lulusan jenjang pendidikan lainnya. Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah mempunyai TPT terendah sebesar 2,74%. Berbeda dengan Agustus 2022, terjadi peningkatan TPT pada kategori pendidikan SMK yaitu Diploma I/II/III dan Diploma IV/S1/S2/S3, dengan kenaikan paling signifikan terjadi pada pendidikan Diploma I/II/III. sebesar 2,14 poin persentase. Sebaliknya, SMA Umum, SMP, dan SD kebawah mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,12 poin persentase, 0,51 poin persentase, dan 1,85 poin persentase. Tren ini berbeda dengan TPT kategori pendidikan pada bulan Agustus 2021, dimana terjadi penurunan di seluruh jenjang pendidikan, dengan penurunan paling besar terjadi pada pendidikan SMP sebesar 1,83 poin persentase. (BPS Jawa Tengah, 2023)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Untuk memitigasi dampak pandemi di Jawa Tengah, kehadiran Disnakertrans dan Dinas Tenaga Kerja memegang peranan krusial. Disnakertrans bukan sekadar sarana memperoleh informasi; hal ini juga merupakan cara utama untuk merumuskan dan melaksanakan strategi komprehensif untuk mengurangi dampak kemiskinan. Melalui kolaborasi dengan berbagai entitas seperti pemerintah daerah, organisasi pelatihan profesi, dan sektor swasta, Disnakertrans berupaya menciptakan ekosistem yang penting bagi pengembangan ketenagakerjaan terkait pekerjaan. Bagian kesimpulan menyajikan secara singkat jawaban atau hasil temuan dari hasil penelitian. Upaya Disnakertrans tidak dipengaruhi oleh jumlah jam kerja, namun juga fokus pada peningkatan standar kualitas produk kerja. Hal ini tercermin dalam program pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi yang dirancang Disnakertrans untuk membantu pegawai menjadi lebih mahir dalam mengarungi dunia kerja yang dinamis. Dengan pendekatan ini, Disnakertrans tidak hanya diam-diam mengatasi masalah kemiskinan, namun juga menciptakan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Selain itu, Disnakertrans juga berfungsi sebagai mediator antara pemilik usaha dan pegawai. Melalui fasilitasi komunikasi kedua pihak, Disnakertrans membantu memenuhi kebutuhan pegawai dan sesekali memberikan kesempatan kepada pegawai untuk bekerja di sektor yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dalam hal ini, Disnakertrans berfungsi sebagai agen perubahan yang membantu menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi di Jawa Tengah dan juga sebagai badan yang mengadvokasi undang-undang. Meski permasalahan gangguan pengangguran masih kompleks, keberadaan Disnakertrans di Tengah memberikan landasan bagi koreksi jangka panjang. Melalui terus-menerus memajukan inovasi kebijakan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan, Disnakertrans dapat tetap menjadi yang terdepan dalam mengatasi tantangan implementasi kebijakan dan menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

### **Saran**

Dengan menetapkan tujuan spesifik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dapat meningkatkan efektivitas strategisnya dalam mengatasi tantangan kemiskinan di Jawa Tengah.

1. Disnakertrans harus memperkuat kolaborasi aktif dengan pemilik usaha, organisasi pelatihan, dan pakar teknis untuk menyelaraskan program pelatihan dengan kebutuhan industri saat ini. Kerja sama tim yang kuat ini dapat membantu memastikan bahwa mereka yang melakukan inspeksi kerja memiliki keterampilan yang sejalan dengan lingkungan kerja yang dinamis.
2. Memahami dinamika dan perkembangan industri di wilayah ini, secara berkala menjadi kunci dalam pemantauan pasar kerja. Dengan memahami tren pasar, Disnakertrans dapat mempengaruhi program pelatihan dan

transfer pegawai ke industri dengan prospek pertumbuhan positif, sehingga mengurangi kesenjangan antara permintaan dan pasokan pegawai.

3. Selain itu, Disnakertrans dapat memperkuat inisiatif tersebut dengan memperkuat hubungan bisnis. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada pemilik usaha lokal, Anda dapat mendorong pengembangan kontraktor independen, mengurangi pelanggaran kontrak formal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lebih mandiri dan inovatif pikir di kalangan masyarakat dapat ditambahkan dengan fasilitasi kewirausahaan, yang membantu mengurangi beban penurunan. Disnakertrans juga dapat digunakan untuk menjaga hubungan kerja yang positif dengan berbagai industri, memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan karyawan, serta meningkatkan efisiensi hasil kerja karyawan.
4. Yang tidak kalah penting adalah kampanye pendidikan massal yang agresif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan stres terkait pekerjaan, pertumbuhan industri, dan keterampilan yang diperlukan. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat tentang berbagai macam kecelakaan mobil, Disnakertrans dapat membantu menciptakan komunitas di mana masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai pekerjaan dan pendidikan.
5. Terakhir, analisis komparatif terhadap program yang dilaksanakan akan digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas dan profitabilitasnya. Disnakertrans dapat menyesuaikan dan memperbaiki program demi program dengan menganalisis hasil evaluasi, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan memberikan dampak terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah , 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Agustus 2023*. Jawa Tengah : Badan Pusat Statistik
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah. *Pembangunan Kawasan Transmigrasi*. Jawa Tengah , 2023.
- Darmayanti, J. R., Handayani, P. A., & Supriyono, M. (2021, December). *Hubungan Usia, Jam, dan Sikap Kerja terhadap Kelelahan Kerja Pekerja Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah*. In *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* (Vol. 4).
- Elviandri, E., & Ismail Shaleh, A. (2022). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah*.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022, January). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan*. In *Forum Ekonomi* (Vol. 24, No. 1, pp. 45-53).

### Perundang-undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### Jurnal

- Anwar, A. A. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Periode 2002-2021 Analisis Data Time Series*. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(3), 194-206.
- Fajriati, R. A., Sonhaji, S., & Suhartoyo, S. (2019). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI (STUDI KASUS: PROVINSI JAWA TENGAH)*. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1419-1434.
- Mahendra, D. B., & Utomo, Y. P. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2017-2021*. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 329-342.
- Purboningtyas, I., Sari, I. R., Guretno, T., Dirgantara, A., Agustina, D., & Al Haris, M. (2020). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Sainika Unpam: Jurnal Sains Dan Matematika Unpam*, 3(1), 81.

### Website

- Mustajab, Ridhwan, 2023, *Jumlah Pekerja Migran Indonesia (2015-2022)*, Internet, Tersedia di : <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/jumlah-pekerja-migran-indonesia-sebanyak-344-juta-pada-2022> , Diakses pada 17 November 2023.